

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata menjadi salah satu jenis industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. Nurdiansyah (2014:43) mengatakan bahwa pariwisata merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kecil orang dari kaum bangsawan, tetapi saat ini kegiatan tersebut sudah menjadi aspek dalam kehidupan manusia secara umum.

Industri pariwisata mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan devisa negara. Bentuk kegiatan pariwisata mempunyai tingkatan yang dapat dikembangkan menjadi salah satu sarana penopang kegiatan perekonomian negara. Kegiatan pariwisata mulai dikembangkan dan diarahkan pada upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan metode dan kaidah penyelamatan ekosistem yang disebut sebagai ekowisata. Tujuan utama ekowisata adalah untuk mengembangkan kegiatan wisata yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga (Fandeli, 2000:54). Konservasi lingkungan juga dikemukakan oleh Mukminan (2018:79), bahwa definisi fisiografis suatu wilayah yang menggambarkan hamparan tanah, air, dan udara, serta fenomena sosial, dimana ada biotik dan abiotik yang berinteraksi satu sama lain dan saling bergantung. Kondisi ini harus benar diketahui dan dipahami oleh masyarakat dalam upaya melestarikan sifat tempat tinggal mereka.

Catatan Badan Pusat Statistik (2018:4) bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai 99.093 km dan memiliki jumlah pulau lebih dari 17.504 buah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Potensi laut dan pesisir yang dimiliki Indonesia yaitu sumber daya hayati, non hayati, dan jasa-jasa lingkungan. Wilayah pesisir dan laut Indonesia yang sangat luas dapat memberikan kekayaan sumberdaya yang dapat dikelola menjadi kawasan wisata.

Kawasan pesisir merupakan salah satu lingkungan yang kompleks karena merupakan tempat peralihan antara ekosistem darat dan laut. Wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai macam jenis habitat beserta keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi (Husamah, 2018:87). Indonesia memiliki tiga ekosistem pesisir yang ditemukan berdampingan yaitu ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kawasan pesisir yang ditumbuhi mangrove secara umum tahan terhadap berbagai tekanan lingkungan, tetapi sangat peka terhadap pengendapan, tinggi rata-rata permukaan air, pencucian, dan sedimentasi.

Hutan mangrove merupakan jenis hutan tropis yang memiliki keunikan tersendiri, tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai mempunyai pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal (Bengen, 2000:67). Mangrove dapat tumbuh di habitat dengan kadar garam yang cukup tinggi melalui adaptasi sistem morfologi, anatomi, dan fisiologi, sehingga mangrove mampu bertahan hidup di pesisir pantai maupun di muara sungai.

Luas mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan, pada tahun 1982 luas ekosistem mencapai 4,25 juta ha. Penurunan luasan mangrove dikarenakan berbagai tekanan pembangunan area sekitar mangrove. Luas mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,11 juta ha (Direktorat Pesisir dan Kelautan, 2012:32). Hutan mangrove memiliki berbagai peranan baik segi ekologis, sosial ekonomi, dan budaya. Peranan mangrove dapat menjaga keutuhan garis pantai, melindungi perikanan, keanekaragaman hayati pantai, serta memiliki fungsi konservasi, dan pendidikan (Karlina, 2015:192). Ekosistem *mangrove* juga dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis ekowisata (Aqla, 2002:25).

Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai ekowisata sesuai dengan perubahan minat bagi wisatawan yang awalnya hanya datang untuk melakukan wisata saja, menjadi tujuan wisata dengan tujuan pendidikan dan konservasi di dalamnya. Tujuan *new tourism* yaitu untuk mengelola dan mencari daerah tujuan ekowisata yang alami dan kaya akan keanekaragaman hayati (Novianti 2016:157).

Kabupaten Rembang terletak di pantai utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 1.024 km² dan panjang garis pantai 63,5 km. Wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Rembang seluas 355,95 km², meliputi 35% dari luas seluruh wilayahnya. Setyawan dan Winarno (2006:161) ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Rembang terdapat di kawasan muara sungai, dan juga terdapat pada lokasi lain yang terlindung dari gelombang laut. Vegetasi mangrove yang tumbuh dapat berkembang menjadi ekosistem hutan yang dipergunakan untuk mitigasi masyarakat pesisir. Tegakan mangrove di Kabupaten Rembang yang

menjadi ladang konservasi yaitu hutan mangrove Pasar Banggi. Mangrove di Pasar Banggi merupakan salah satu ekosistem hasil rehabilitasi yang diupayakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dinas konservasi.

Konversi hutan mangrove menjadi tambak merupakan faktor utama penyebab berkurangnya hutan mangrove, tidak terkecuali di Indonesia, salah satunya di pesisir Kabupaten Rembang. Kawasan tambak di area hutan mangrove merupakan pemandangan umum, baik tambak udang, bandeng, maupun tambak garam. Pengalih fungsian hutan mangrove menjadi tambak diawali dengan kegiatan penebangan tumbuhan mangrove sehingga mengurangi luasan hutan mangrove di Desa Pasar Banggi (Setyawan A. dan Kusumo W, 2006:162).

Tambak di kawasan hutan mangrove Desa Pasar Banggi dikelola secara intensif dan lahannya semakin menjorok ke lautan. Widowati (2013:121) mengatakan bahwa konversi hutan mangrove menjadikan luasan mangrove berkurang dan lahan tambak menjadi menjorok ke arah laut. Hal ini bertentangan dengan usaha pengelolaan ekosistem mangrove yang dimulai sejak tahun 1964 dengan melakukan rehabilitasi secara swadaya oleh masyarakat untuk melindungi tambak dari abrasi oleh gelombang laut. Hutan mangrove ini merupakan hutan rakyat sehingga masih ada yang bersertifikat hak milik pribadi (Adhikari, 2010:448).

Kawasan hutan mangrove di Pasar Banggi Kabupaten Rembang merupakan objek wisata baru dengan luas kurang lebih 22 ha, terbentang sepanjang 2.900 m. Jenis tanah di hutan *mangrove* Pasar Banggi yaitu grumosol

berpasir dan lumpur. Kawasan mangrove Pasar Banggi merupakan salah satu hutan mangrove yang masih ideal dan sudah ada sekitar tahun 1960. Kawasan ini memiliki sentra persemaian bibit mangrove yang sudah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Rembang (Setyawan, 2006:160).

Kawasan hutan mangrove menjadi tujuan wisata baru yang merupakan primadona di Kabupaten Rembang. Keindahan dan daya tarik kawasan hutan mangrove Pasar Banggi juga diakui oleh masyarakat Rembang sebagai wisata alam pesisir. Kegiatan pariwisata hutan mangrove Pasar Banggi dikelola oleh kelompok masyarakat setempat yang dikenal dengan kelompok tani “Sidodadi Maju”. Kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan mangrove Pasar Banggi konsisten melakukan kegiatan konservasi kawasan mangrove pesisir, dan mengelola kawasan tersebut untuk tujuan wisata. Model pengelolaan konservasi tetap mempertimbangkan prinsip ekologi wilayah atau dikenal dengan istilah ekowisata. Sutopo (2001:23) mengatakan bahwa bentuk ekowisata berupa pemanfaatan lahan konservasi didasarkan pada asas manfaat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Permasalahan yang muncul pada kawasan hutan mangrove terkait pengelolaannya adalah keberlangsungan program ekowisata yang sedang dijalankan. Kawasan hutan mangrove Pasar Banggi merupakan kawasan hutan mangrove yang paling menarik dibandingkan dengan wisata pesisir lain yang ada di Kabupaten Rembang. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 yang memiliki tujuan pengelolaan pariwisata berbasis ekowisata dan pusat

pengembangan *mangrove* (*mangrove center*). Pihak pemerintah maupun masyarakat telah mengupayakan pengelolaan ekowisata hutan mangrove dengan harapan dapat menjadikan wisata yang mengedepankan konservasi, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil perubahan optimal.

Kabupaten Rembang terkenal dengan objek pariwisata pesisir yang banyak diminati, karena wilayahnya terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan gelombang laut yang tenang. Perbandingan dengan tingginya minat wisatawan terhadap ekowisata mangrove akan berimplikasi terhadap berbagai risiko yang harus diwaspadai, baik dari aspek pengembangannya maupun kelestariannya. Kusaeri (2015:187) bahwa risiko dapat berasal dari masyarakat, yaitu tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab serta masalah ketidakstabilan pengelolaan dari pihak pengelola, sehingga pengelolaan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan prinsip ekowisata yang semestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Kabupaten Rembang”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pihak pengelola terkait pengelolaan yang dilakukan untuk keberlangsungan program ekowisata hutan *mangrove* di Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Kawasan hutan *mangrove* memiliki potensi besar jika prinsip ekowisata yang diterapkan dapat berjalan dengan semestinya.

B. Deskripsi Program

Program yang akan dievaluasi adalah program ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi di Kabupaten Rembang. Ekowisata hutan mangrove adalah sebuah program yang telah dikelola oleh masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk perlindungan ekosistem hutan mangrove. Pengembangan konsep ekowisata diterapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata daerah. Program ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan beberapa upaya seperti pembinaan karangtaruna Desa Pasar Banggi, penanaman bibit mangrove secara rutin untuk memperluas kawasan hutan mangrove, dan masih banyak pembinaan yang lainnya. Program ekowisata kawasan hutan mangrove Pasar Banggi memiliki beberapa atraksi, antara lain atraksi konservasi dan budaya.

Ekosistem hutan mangrove Pasar Banggi belum seperti yang diharapkan, karena ketimpangan perhatian pemerintah Kabupaten Rembang dan kelompok-kelompok tani yang lebih mementingkan program wisata serta keteguhan masyarakat Pasar Banggi untuk tetap mengelola hutan mangrove secara mandiri. Ancaman yang terdapat pada kawasan ini yaitu usaha pertambakan, penebangan hutan, reklamasi pantai, sedimentasi, dan pencemaran lingkungan. Adanya peraturan desa yang terpasang di beberapa tempat, termasuk di tengah hutan, seharusnya menjadi alat yang ampuh dalam menjaga kelestarian hutan mangrove menjadi salah satu bentuk kearifan lokal di wilayah pesisir, dan sebagai kawasan

ekowisata. Tetapi peraturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat setempat maupun pengunjung.

Konsep ekowisata merupakan salah satu alternatif yang menarik untuk dikembangkan sebagai suatu kawasan tujuan wisata yang tetap memperhatikan konservasi lingkungan dengan menggunakan potensi sumberdaya serta budaya masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata ditujukan untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep semacam ini sering disebut konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Implementasi ekowisata secara nyata di lapangan belum tentu sesuai dengan kriteria yang diusulkan. Pelaksanaan ekowisata memungkinkan terjadinya kesalahan dalam memahami dan memanfaatkan istilah ini. Banyak orang menganggap bahwa ekowisata adalah aktivitas wisata alam terbuka seperti halnya gunung, hutan, pedesaan dan sebagainya (Rahardjo, 2004:135). Kekawatiran muncul, ketika istilah ekowisata digunakan hanya sebagai label wisata yang berbasis alam dengan memanfaatkan peluang menarik wisatawan tanpa memberikan edukasi tentang ekowisata.

Fakta yang telah dikemukakan diduga kuat karena ada beberapa unsur program dari ekowisata yang belum terlaksana dengan semestinya. Kelemahan pengelolaan ekowisata hutan *mangrove* juga menjadi salah satu penyebab tidak sepenuhnya program ekowisata terlaksana dengan baik. Pengelolaan yang masih bersifat sektoral dengan ujung tombak masyarakat setempat, sepertinya tidak mampu mengembangkan unsur-unsur program yang harus dilakukan. Akibatnya pengelolaan wisata hutan *mangrove* menjadi terasa kurang maksimal, karena

tidak mampu mengatur berbagai kepentingan yang masuk di sektor ini. Adakah kekurangan ataupun kesalahan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove, sehingga program ekowisata yang tengah dijalankan belum bisa berjalan sesuai peraturan yang ada?

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi program dan observasi lapangan, ditemukan masalah-masalah cukup kompleks, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan wilayah pesisir di Indonesia sebagai objek wisata menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan pesisir.
2. Kerusakan ekosistem pesisir menyebabkan kerusakan wilayah yang ada disekitarnya.
3. Pergeseran minat wisata alam yang biasa menjadi wisata berbasis ekowisata belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan ekosistem pesisir menjadi lebih baik.
4. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata hanya menjadi label penarik wisatawan, bukan sepenuhnya dengan tujuan konservasi.
5. Belum maksimalnya tindakan untuk mewujudkan tujuan konservasi berbasis ekowisata.
6. Pengelolaan ekowisata hutan mangrove belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekowisata.

D. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan tentang pengelolaan kawasan hutan mangrove sebagai objek wisata berbasis ekosistem, maka penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Pergeseran pengembangan wisata alam menjadi wisata berbasis ekowisata belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan ekosistem pesisir menjadi lebih baik.
2. Belum maksimalnya tindakan pengelola untuk mewujudkan tujuan ekowisata kawasan hutan mangrove di Pasar Banggi Kabupaten Rembang.
3. Pengelolaan ekowisata hutan mangrove belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekowisata.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi dan pembatasannya, maka masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan.

1. Bagaimana hasil evaluasi pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Rembang berdasarkan prinsip ekowisata?
2. Bagaimana upaya yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Rembang agar sesuai dengan prinsip ekowisata?

F. Tujuan Evaluasi

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian evaluasi yang ingin dicapai adalah mengetahui secara pasti:

1. Mengetahui hasil evaluasi pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Rembang berdasarkan prinsip ekowisata.
2. Memberikan saran untuk penyempurnaan pengelolaan kegiatan pengelolaan hutan *mangrove* di Kabupaten Rembang sebagai kawasan ekowisata.

G. Manfaat Evaluasi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata di Pasar Banggi yang sedang diteliti. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di latar belakang, penulisan ilmiah ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi Pengelola Kawasan Hutan Mangrove

- a. Mengetahui potensi dan kendala yang terdapat di kawasan hutan *mangrove* Pasar Banggi sebagai objek wisata berbasis ekowisata.
- b. Membantu pengelola untuk mendapatkan alternatif cara dalam peningkatan pengelolaan kawasan hutan *mangrove* sebagai kawasan ekowisata.
- c. Sebagai masukan positif yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kawasan hutan *mangrove* sebagai sarana konservasi wilayah pantai di Kabupaten Rembang.

2. Bagi Akademik:

- a. Sebagai sumber inspirasi, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai pembelajaran tentang mitigasi bencana pesisir dan konservasi pesisir bagi mahasiswa/siswa.
- b. Sebagai alternatif sumber belajar konservasi dan mitigasi wilayah pesisir.

3. Bagi Penulis:

- a. Sebagai bekal pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan disiplin ilmu geografi.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar magister pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.